

Abstract

The dynamics of democratization in Indonesia has grown in the long times since the falling of Soeharto's Regime and now remaining in the stagnation conditions, if we would not say it's deteriorating. The democratic institutions which have the fundamental roles to represents the people's interest, ironically there are in the risky conditions. Political parties and NGO tend to be hijacked by the political and economical elits for their interests without pay attention about common people interests. The things that make it worst is peoples begin fell more distrust in the representation institutions because their bad performances in representing the common peoples interest. PDI-P and Kompip Solo in Surakarta are the two representations institutions which are the one we can categorize as formal representation institution and the another one as informal institution. They have good enough reputations in Surakarta. PDI-P is the most dominating parties in Surakarta. PDI-P dominate in the DPRD (Local's House Of Representative) and in the executive because the mayor and the deputy are the members of PDI-P. And so do Kompip Solo, the NGO which has the good reputation about it's capacity. Recently many members of Kompip Solo have migrated to the government official, SAA, even politician can be their best evidence. Furthermore, that is interesting to assess the democratic capacities of PDI-P and Kompip Solo as the representation institutions through the Olle Tornquist frameworks about assessing the quality of democratization in Indonesia.

Furthermore, the research question is How about the capacities of political representation institutions at PDI-P and Kompip Solo in Surakarta on the process of managing the public affairs? Depart from the David Beetham's definition about democracy which said that the point of democracy is about the popular control of public affairs on the basis of political quality, Olle Tornquist proposes the thirteen institutions which can be the instrument to see the quality of democracion in Indonesia. To optimize that thirteen institutions, at least there are need five variables from the democratic actors which in the next phase can also be the tools in this research to assess the capacity of that democratic institutions in the proccess of managing the public affairs. These variables are 1) Capacity of Political Inclusion (How democratic institutions overcome exclusion), 2) Capacity to get authority and legitimacy, 3) Capacity Of Making Politicization and agenda – setting, 4) Capacity of mobilization and developing organization, 5) Capacity to increase political participation and representation

Using the qualitative methods and the case studies design, the evidence based the field study show that two institions have the different specialities and limitation in every capacities that we had measured. Moreover, this study gives the answer that both of the formal and informal political representation institutions have the capacities in the diverse levels in their function as the institutions of political representation. Hence, the collaboration between them is the possible things which aim to overcome their problems about representation. Likewise, the interactions that developed among them have the complementary characters.

Abstrak

Dinamika perkembangan demokratisasi di Indonesia telah berjalan dalam waktu yang cukup panjang sejak kejatuhan era Orde Baru dan cenderung stagnan bila tidak ingin dikatakan mengalami kemunduran. Lembaga - lembaga demokrasi yang memiliki peran fundamental dalam mewakili kepentingan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik seperti lembaga representasi justru berada dalam titik nadir. Partai politik dan CSO dalam hal ini cenderung dibajak oleh para elit politik atau ekonomi guna mewakili kepentingannya saja tanpa mengindahkan kepentingan rakyat. Ironisnya hal tersebut didukung oleh ketidakpercayaan rakyat yang semakin meningkat terhadap lembaga - lembaga representasi. PDI-P dan Kompip Solo di Surakarta merupakan dua lembaga representasi formal dan informal yang dapat dikatakan terpendang di Surakarta. PDI-P merupakan partai yang sangat mendominasi di Surakarta di tataran legislatif atau eksekutif. Juga Kompip Solo, CSO yang kapasitasnya diakui oleh lapisan masyarakat dengan banyaknya anggota Kompip Solo yang bermigrasi menjadi bagian dari pemerintahan atau organisasi sub-kontrak pengelola urusan publik. Menarik kemudian untuk melihat sejauh mana kapasitas kedua lembaga representasi tersebut melalui kerangka pikir yang dikembangkan Olle Tornquist dalam mengukur kualitas demokrasi di Indonesia.

Sehingga pertanyaan mendasarnya ialah Bagaimana kapasitas lembaga representasi politik PDI-P dan Kompip Solo di Kota Surakarta dalam proses pengelolaan urusan publik? Berpijak dari definisi demokrasi David Beetham yang menyatakan esensi demokrasi ialah kontrol populer terhadap urusan publik berdasarkan kesetaraan politik, Olle Tornquist menawarkan tiga belas institusi yang dapat dijadikan instrumen untuk melihat kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan ketigabelas institusi tersebut diperlukan setidaknya lima variabel dari aktor demokrasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur kapasitas lembaga demokrasi tersebut dalam pengelolaan urusan publik. Lima variabel tersebut yang kemudian dijadikan acuan untuk mengukur kapasitas lembaga representasi (PDI-P dan Kompip Solo) di Surakarta ialah 1) Kapasitas Melakukan Inklusi, 2) Kapasitas Memperoleh Legitimasi, 3) Kapasitas Melakukan Politisasi Isu dan Menciptakan Agenda, 4) Kapasitas Melakukan Mobilisasi dan Membangun Organisasi, 5) Kapasitas Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Representasi.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan desain studi kasus yang digunakan, temuan dilapangan menunjukkan bahwa kedua lembaga representasi tersebut cenderung memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri di masing masing kapasitas. Studi ini kemudian memberikan jawaban bahwa lembaga representasi formal dan informal memiliki kapasitas dalam tataran yang berbeda, keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasan yang berbeda pula dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga representasi. Oleh sebab itu, kerjasama diantara keduanya dalam pengelolaan urusan publik yang dalam hal ini terkait kaum miskin kota di Surakarta merupakan hal



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**Kapasitas Lembaga Representasi Politik Surakarta (Studi Tentang Tingkat Kapasitas dan Pola Relasi
Institusi Representasi di Kota Surakarta dalam Pengelolaan Urusan Publik oleh PDI-P dan KOMIP
Solo)**

ARIS SETIAWAN YODI, Dr. Rer.Pol. Mada Sukmajati, S.I.P., M.P.P.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

yang harus dilakukan. Interaksi yang terbangun diantara keduanya kemudian bersifat complementary atau saling melengkapi.